

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI 1. Kesimpulan**

Rekrutmen bakal calon kepala daerah yang dilakukan internal PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon walikota Solo memperlihatkan problematik dalam hal kelembagaan partai politik. Dinamika yang terjadi dalam proses rekrutmen mulai dari proses penjaringan hingga penetapan calon walikota Solo pada pilkada serentak 2020 ditinjau dari personalisasi partai politik terdapat dua kriteria utama yang melatarbelakangi ketidak sinambungan antara peraturan partai mengenai rekrutmen kepala daerah dengan implementasinya.

Pertama, dominasi ketua umum yang terlihat dalam penetapan calon Walikota Solo. Penetapan Gibran sebagai calon Walikota Solo dilakukan secara sepihak oleh Megawati Soekarnoputri tanpa melibatkan struktur partai lainnya terutama DPC PDIP Surakarta. Hal ini di dasari atas hak prerogatif yang dimiliki ketua umum. Dominasi ketua umum juga di internal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh jabatannya di dalam partai yang tidak hanya sebagai pemimpin partai namun juga pendiri partai tersebut sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan partai sangat dominan yang meliputi keputusan, penunjukan, atau dalam hal ini pencalonan Walikota Solo.

Kedua, kapasitas organisasi partai yang lemah. Menurut Gunther dan Diamond ditandai dengan struktur organisasi yang tidak berkembang dengan tidak adanya prinsip demokrasi lebih kepada adanya pengaruh ketua umum yang menyebabkan keputusan bersifat sentralistik. Terkait dengan peraturan rekrutmen sendiri pada dasarnya terdapat peraturan tersebut namun hanya bersifat prosedur semata tanpa adanya implementasi dengan baik dan dijelaskan bahwa rekrutmen sendiri dilakukan oleh pemimpin dan diterima tanpa adanya perbedaan pendapat (Gunther & Diamond, 2003). Hal ini terlihat di dalam internal PDI-Perjuangan yang ditandai dengan peraturan partai dalam hal rekrutmen bakal calon yang tidak

diimplementasikan dengan baik. Peraturan partai No 24 Tahun 2017 dapat dikatakan hanya sebatas prosedural bahkan tidak dijalankan oleh ketua umum partai. Prinsip demokrasi yang tidak nampak dalam proses rekrutmen juga menandai kapasitas organisasi partai yang lemah. Partisipasi kompetisi, serta difusi kekuasaan tidak tampak dalam proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo yang dilakukan internal PDI Perjuangan. Proses rekrutmen pada akhirnya menunjukkan pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik yang ditandai dengan ketidak mampuan struktur partai tingkat lokal untuk menerapkan skema *bottom-up* dengan menetapkan calon berdasarkan hasil penjangkaran yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan kota Surakarta yaitu Achmad Purnomo sebagai calon Walikota Solo. Sikap pragmatisme PDI Perjuangan dalam penetapan calon Walikota Solo pada pilkada serentak 2020 dengan melihat latarbelakang sosial dari Gibran yaitu sebagai putra kandung Presiden Joko Widodo yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan citra serta popularitas Gibran, sehingga menjadi faktor utama mengapa dirinya dipilih.

Penelitian ini menunjukkan proses rekrutmen yang dilakukan internal PDI Perjuangan ditinjau dari personalisasi partai memberikan gambaran mengenai dinamika di dalam fungsi rekrutmen yang meliputi pola kekuasaan di dalam partai, problematik kelembagaan partai, dan perilaku partai politik. Ketiganya menjadi temuan hambatan terbesar PDI-Perjuangan dalam menjalankan fungsi rekrutmen di Internal partai politiknya dalam menentukan calon Walikota Surakarta tahun 2020. Disamping itu terdapat kekurangan dalam penelitian ini dalam mengkaji lebih dalam aspek lain yang melatarbelakangi keterlibatan ketua umum partai dalam menetapkan calon kepala daerah. Selain itu juga terdapat kekurangan dalam mengungkap siapa aktor yang mengusulkan nama Gibran dan kepentingan apa yang dibawa internal partai PDI-Perjuangan dengan penetapan Gibran sebagai Calon Walikota Solo pada pilkada serentak tahun 2020.

## **VI 2. Saran**

### **VI 2 1. Saran Praktis**

Partai PDI Perjuangan perlu mengimplementasikan peraturan partai tentang rekrutmen kepala daerah sebab hal ini berdampak kepada kelembagaan partai politik itu sendiri yang mengarah kepada kemandirian struktur partai di tingkat daerah. Implementasi peraturan partai mengenai rekrutmen bakal calon kepala daerah juga perlu didasari dengan nilai-nilai demokrasi di samping adanya tugas dan fungsi yang jelas di dalam struktur partai namun juga pada desentralisasi kekuasaan sehingga tidak memunculkan dominasi yang kuat dari Ketua Umum. Realita yang terjadi justru sebuah paradoks di dalam partai. Partai yang dikatakan sebagai partai demokrasi namun tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

### **VI 2 2. Saran Teoritis**

Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai rekrutmen bakal calon kepala daerah dengan melibatkan kekuasaan ketua umum dalam menentukan calon kepala daerah selain melihat latarbelakang calon tersebut yang memiliki hubungan yang bersifat dinasti, namun meneliti apakah intervensi tersebut juga di dasari atas daerah yang telah dikuasi dalam waktu yang cukup lama sehingga perlu untuk mengusung calon yang memiliki potensi kuat untuk memenangkan kontestasi politik sehingga ketua umum terlihat turut andil dalam penentuan calon kepala daerah, serta melihat apakah daerah yang tidak dikuasi oleh Partai PDI Perjuangan cenderung dapat menjalankan rekrutmen berdasarkan peraturan partai dengan memberikan keleluasaan bagi DPC untuk menentukan calonnya sehingga terlihat adanya desentralisasi kekuasaan.